

## **IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROGRAM PERCEPATAN PENINGKATAN TATA GUNA AIR IRIGASI (P3TGAI) DALAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DI DESA JATIDROJOG KECAMATAN KEDUNGPRING KABUPATEN LAMONGAN**

**Arya Bagus Pramudyansyah**

Program Studi S1 Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya  
[arya.19029@mhs.unesa.ac.id](mailto:arya.19029@mhs.unesa.ac.id)

**Badrudin Kurniawan**

Program Studi S1 Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya  
[badrudinkurniawan@unesa.ac.id](mailto:badrudinkurniawan@unesa.ac.id)

### **Abstrak**

Di dalam Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui program Implementasi Kebijakan Program Percepatan Peningkatan Tata Guna air Irigasi yang sedang di jalankan oleh Pemerintah Desa Jatidrojog pada masa saat ini Pemerintah Desa Jatidrojog melakukan Kegiatan tersebut guna memperbaiki infrastruktur terutama di bidang pertanian yakni pembangunan Irigasi .Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan metode pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan studi dokumentasi, penelitian ini dianalisis menggunakan teori Ada Smith dengan empat indikator yaitu kebijakan yang ideal, kelompok sasaran, organisasi pelaksana, dan faktor lingkungan . hasil dari penelitian ini dimana kegiatan tersebut didukung penuh oleh Pemerintah Desa maupun masyarakat Desa Jatidrojog karena dapat meningkatkan kegiatan perekonomian terutama di bidang pertanian, karena kondisi Desa Jatidrojog yang notabene masyarakatnya bermatapencaharian sebagai petani jadi program tersebut sangat perlu untuk dijalankan setiap tahunnya . hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa program tersebut sudah berjalan dengan baik meskipun ada beberapa kendala di dalam pelaksanaannya . harapan Pemerintah Desa maupun masyarakat Desa Jatidrojog terhadap program ini adalah dapat berjalan tiap tahun dan perlu adanya evaluasi setiap tahunnya. Tentu program tersebut akan berjalan dengan baik apabila timbul suatu sinergi dari kedua belah pihak, saling memberi dan menerima masukan akan membuat program tersebut akan lebih memberikan dampak yang positif kepada masyarakat terutama petani di Desa Jatidrojog,

**Kata Kunci** : Kebijakan Pembangunan desa, pemberdayaan masyarakat, pengelolaan irigasi

### **Abstract**

In this research, it aims to find out the Policy Implementation Program for the Acceleration of Improvement of Irrigation Water Utilization which is currently being run by the Jatidrojog Village Government. is a descriptive qualitative method of collecting data through interviews, observation, and documentation studies. This study was analyzed using Ada Smith's theory with four indicators, namely ideal policies, target groups, implementation organizations, and environmental factors. The results of this research are that the activity is fully supported by the Village Government and the Jatidrojog Village community because it can increase economic activity, especially in the agricultural sector, because of the conditions in Jatidrojog Village, whose people earn a living as farmers, so this program really needs to be run every year. the results of this study indicate that the program has been running well even though there are some obstacles in its implementation. the expectations of the Village Government and the Jatidrojog Village community for this program are that it can run every year and there needs to be an annual evaluation. Of course the program will run well if there is a synergy from both parties, mutual giving and receiving input will make the program have a more positive impact on the community, especially farmers in Jatidrojog Village,

**Keywords:** Village Development Policy, community empowerment, irrigation managem

## **PENDAHULUAN**

Desa merupakan kesatuan wilayah yang ditempati oleh banyak keluarga dan dipimpin oleh seorang kepala desa. Menurut Undang-undang No 6 Tahun 2014, desa, desa adat, atau desa, adalah kesatuan masyarakat hukum dengan batas wilayah yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang mendapatkan pengakuan dan penghormatan dalam sistem pemerintahan Negara Republik Indonesia. Dengan keluarnya Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, masyarakat desa dan pemerintahan desa mendapat harapan baru. Ada kemungkinan bahwa hak-hak asal usul desa, hak-hak tradisional, dan otonomi desa yang asli akan diakui, yang merupakan bentuk harapan baru. Desa memiliki sejarah panjang untuk mempertahankan statusnya sebagai daerah yang memiliki status unik dan kepastian hukum dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia (Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa).

Pembangunan Desa merupakan ranah dari pembangunan nasional, dimana jika terdapat desa yang mampu dalam pembangunan nasional secara mandiri maka desa tersebut mampu mewujudkan kesejahteraan dan peningkatan indeks kemakmuran masyarakat Indonesia (Abdurokhman, 2014:2)

Desa-desadi Indonesia saat ini sangat berfokus pada pembangunan infrastruktur. Ini dianggap penting karena dilakukan untuk meningkatkan keadaan dan mencegah kesenjangan antar wilayah, yang didalamnya termasuk pedesaan dan perkotaan . Seolah-olah pembangunan infrastruktur perkotaan lebih cepat daripada pembangunan Desa yang dianggap terhambat dan kekurangan akan sumber daya. Mayoritas penduduk desa meninggalkan desa untuk mencari kehidupan di kota karena hidup di bawah garis kemiskinan. Dengan mempertimbangkan masalah ini, dapat disimpulkan bahwa pembangunan infrastruktur harus disamaratakan sehingga tidak ada ketimpangan(.Prasojo,2015).

Menghadapi lingkungan ketiga desa (alam, budaya, dan sosial ekonomi) dengan benar dikenal sebagai pembangunan desa. Menurut Daljoeni & Suyitno, tahun 2004: 37 Salah satu bagian dari pembangunan wilayah adalah pembangunan desa. Ini berarti bahwa masyarakat pedesaan harus diprioritaskan di daerah-daerah tertentu untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat (Agustin & Rahaju, 2016). Pembangunan infrastruktur wilayah pedesaan merupakan prioritas yang dilakukan pemerintah untuk meningkatkan ekonomi masyarakat desa dan menurunkan angka kemiskinan melalui

memenuhi kebutuhan yang bersifat mendasar, pembangunan sarana dan juga prasarana, pemberdayaan masyarakat lokal dan penguatan ekonomi masyarakat lokal, dan pemanfaatan akan adanya sumber daya alam baik Sumber daya manusia yang berkelanjutan Undang-undang Republik Indonesia No 6 Tahun 2014 tentang Desa).

Perkembangan berbagai area di suatu wilayah juga sering dikaitkan dengan infrastruktur yang baik, terutama bangunan yang memiliki pengaruh penting di dalam kehidupan masyarakat seperti jalan, jembatan, maupun sarana dan prasarana yang lain. Hanya dengan memperhatikan kondisi ketimpangan Infrastruktur yang ada, kita dapat dengan mudah menentukan tingkat kesejahteraan yang berbeda di suatu wilayah. Selain itu, percepatan dan peningkatan pembangunan infrastruktur terutama di wilayah pedesaan semakin penting Untuk dilakukan, Hal ini disebabkan oleh manfaat infrastruktur, seperti jalan, yang dapat mengisolasi sebuah wilayah dari luar dan diharapkan berdampak pada kesejahteraan ekonomi masyarakat (Sriharjono, 2019).

Untuk mendukung pembangunan infrastruktur desa, pemerintah telah mengeluarkan berbagai peraturan berupa kebijakan. Salah satunya adalah kebijakan Padat Karya Tunai Desa, yang merupakan kebijakan pemerintah yang membantu masyarakat khususnya wilayah pedesaan, terutama mereka yang tergolong masyarakatkalangan bawah atau yang biasa disebut miskin dan marjinal, menjadi lebih produktif dengan memanfaatkan segala potensi yang ditemukan di desa diantaranya adalah sumber daya baik yang dapat diperbarui maupun tidak dapat diperbarui, menekan angka kemiskinan, dan meningkatkan taraf ekonomi dan kesejahteraan masyarakat desa. Pasal 4 Undang-Undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa menyatakan bahwa tujuan pengaturan desa adalah untuk mengatasi kesenjangan pembangunan, menumbuhkan ekonomi masyarakat desa, dan memberikan kekuatan kepada masyarakat desa sebagai subjek pembangunan. (Pedoman PKTD 2017)

Selain bersumber dari dana Desa, pembangunan infratraktur desa diharapkan dapat menyelesaikan masalah yang ada di desa terutama yang berkaitan dengan ekonomi masyarakat diantaranya kasus kemiskinan, stunting, dan pengangguran lebih cepat. Dengan demikian, diharapkan bahwa pelaksanaan Padat Karya Tunai Desa akan meningkatkan produktifitas masyarakat, mengurangi angka gizi buruk, kemiskinan, meningkatkan ekonomi desa, dan memajukan wilayah desa . . Penganggaran kegiatan padat karya, atau skema uang untuk kerja, adalah kunci pelaksanaan program padat karya tunai di desa. Program ini harus dibiayai

melalui Dana Desa dalam APBDDes. (Renstra Kementerian PUPR 2020–2024).

Program Padat Karya Tunai Desa dapat menawarkan lapangan pekerjaan yang disesuaikan bagi masyarakat desa mempromosikan keseimbangan ekonomi di wilayah pedesaan dan mengurangi disparitas. Program padat karya tunai desa yang dilaksanakan pada tahun 2018 dirancang oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat diproyeksikan dapat menyerap 263.646 tenaga kerja, dengan alokasi total 11,24 triliun Rupiah untuk upah harian mencapai 2,4 triliun.

Program padat karya tunai untuk pembangunan infrastruktur desa termasuk program percepatan peningkatan tata guna air irigasi (P3TGAI), operasi dan pemeliharaan (OP) irigasi, pengembangan infrastruktur sosial dan ekonomi wilayah (PISEW), program penyediaan air minum berbasis masyarakat (Pamsimas), dan program sanitasi berbasis masyarakat (Sanimas), pembangunan rumah bagi warga yang memiliki penghasilan rendah dan perbaikan serta pemeliharaan jalan secara teratur. Presiden Joko Widodo telah menetapkan pada Rapat kabinet Terbatas tanggal 3 November 2017 bahwa dana yang di alirkan ke daerah atau ke wilayah pedesaan harus disuporrt dengan program kementerian dan lembaga yang berada di desa yang tujuannya untuk peningkatan ekonomi dan memberikan lapangan pekerjaan yang lebih luas.

Program padat karya tunai desa harus memprioritaskan sumber daya yang berasal dari masyarakat lokal, dengan didukung oleh teknologi lokal yang ada di desa. Desa harus mengelola program ini secara swakelola tanpa menggunakan kontraktor, dan 30 persen dari nilai proyek harus digunakan untuk membiayai masyarakat terlibat perkerjaan selama program berlangsung, yang harus dibayar setiap hari. (Pedoman Padat Karya Tunai Desa Tahun 2017). Program Padat Karya Tunai Desa tidak hanya dibiayai oleh dana desa; itu juga dibiayai oleh kementerian atau lembaga. Dengan memberdayakan masyarakat di desanya, program ini mengutamakan penyerapan tenaga kerja sebanyak mungkin. Dengan sistem pemberian upah langsung secara tunai kepada pekerja yang dilibatkan setiap hari atau setiap minggu, Big Cash for Work ini mengadopsi konsep Cash for Work. Tujuannya adalah untuk mempromosikan potensi masyarakat desa dan, tentu saja, kesejahteraan masyarakat. Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3-TGAI) adalah salah satu program Padat Karya Tunai yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Peraturan pemerintah mengatur beberapa hal dalam

penerapannya. (Buku Pedoman P3TGAI tahun 2017).

Sesuai dengan Pedoman Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021, Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi, juga dikenal sebagai P3-TGAI, adalah program yang dilaksanakan secara mandiri oleh Perkumpulan Petani Pemakai Air, Gabungan Perkumpulan Petani Pemakai Air Swakelola.

Program ini berfokus pada rehabilitasi, pembaruan, peningkatan, atau pembangunan jaringan irigasi yang melibatkan masyarakat pedesaan khususnya petani. Kegiatan P3-TGAI dilaksanakan melalui pemberdayaan masyarakat petani yang tujuannya untuk memperbaiki, meningkatkan, dan membangun jaringan di bidang irigasi secara bertahap dan sistematis dengan tujuan meningkatkan kinerja petani dalam pengelolaan jaringan irigasi terutama di wilayah persawahan. Tahapan pemberdayaan ini dimulai dari perencanaan yang dimulai dari sosialisasi, pendampingan dan pengawasan, evaluasi dan monitoring dan pengelolaan jaringan irigasi, dan melibatkan masyarakat petani dalam peran mereka sebagai pelaksana program P3TGAI (Peraturan Umum KemenPUPR Nomor 4 Tahun 2021).

Tidak dapat dipungkiri bahwa P3TGAI telah menunjukkan tingkat keberhasilan yang cukup tinggi selama pelaksanaannya. Output fisik tahun 2021, yang mencapai 99,99% dengan 726 bangunan utama, 9.074 bangunan pelengkap, dan 3.794 km saluran, dan indeks pertanaman (IP) rata-rata meningkat dari 120% menjadi 170,2% melalui P3TGAI (Pedoman P3TGAI tahun 2021).

Pelaksanaan P3TGAI pada tahun 2021 berdampak langsung pada luasan areal sawah secara nasional, mencapai 459.517 ha di 11.999 lokasi, dengan rata-rata 38 ha per lokasi kegiatan. Dengan anggaran sebesar Rp 5,2 Juta/ha, penilaian keberhasilan P3-TGAI harus dilakukan secara menyeluruh dan berkelanjutan. Realisasi Program Padat Karya Tunai (PKT) 2022 terus dipercepat melalui penilaian indikator kinerja dalam proses pelaksanaan P3TGAI menggunakan surat Edaran dan peraturan yang dikeluarkan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Pedoman P3TGAI Tahun 2021).

Sebagaimana diberitakan oleh [www.inewsSurabaya.id](http://www.inewsSurabaya.id) Haeruddin C. Maddi, Kepala Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Brantas, mengatakan bahwa P3TGAI adalah kegiatan PKT yang bertujuan untuk membangun saluran tersier irigasi dengan luasan lahan maksimal 150 hektar.

Semua petani yang berafiliasi dengan Himpunan Petani Pemakai Air (HIPPA) harus berpartisipasi dalam pelaksanaannya.

Tahun ini, P3TGAI akan berlangsung di 930 lokasi atau desa di 254 kecamatan di 22 kabupaten/kota di Jawa Timur, termasuk Kabupaten Lamongan. Sebagaimana dilaporkan oleh [www.lamongankab.go.id](http://www.lamongankab.go.id), Lamongan terus menjadi salah satu pusat produksi padi terbesar di Jawa Timur. Dengan 154.204 ha lahan panen, Kabupaten Lamongan mampu menghasilkan 1.196.310 ton gabah kering giling (GKG) dari Januari hingga Desember 2021, menurut data dari Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Jumlah ini lebih besar dari yang direncanakan, yaitu 1.116.957 ton, yang akan dikonversikan menjadi 741.712 ton beras. Ini menunjukkan bahwa Kabupaten Lamongan masih bergantung pada sektor pertanian untuk pertumbuhan ekonominya, dan karena itu, infrastruktur yang berkaitan dengan pertanian harus dibangun sepenuhnya.

Guna meningkatkan permintaan dan ketersediaan air dan irigasi, terutama di sektor pertanian. Kabupaten Lamongan terus membangun infrastruktur yang berkaitan dengan pertanian. Karena mayoritas penduduk Kabupaten Lamongan adalah petani, pembangunan ini sangat penting. Tentu saja, pemenuhan infrastruktur yang baik akan menghasilkan hasil panen yang lebih produktif. Menurut [www.beritajatim.com](http://www.beritajatim.com), produksi padi tahun 2021 meningkat menjadi 1.196.310 ton dan produksi jagung menjadi 570.200 ton, meningkat dari 568.200 ton tahun sebelumnya. Dari data ini, dapat disimpulkan bahwa hasil pertanian Kabupaten Lamongan meningkat secara signifikan. Hal tersebut disampaikan oleh Bupati Lamongan dalam pengukuhan Komisi Irigasi di pendopo Lokantara pada Selasa (22/11/2022) dalam keterangannya beliau menuturkan :

*Produksi pertanian, terutama padi dan jagung, tidak mengalami penurunan dan malah terus meningkat sebagai hasil dari pertumbuhan ekonomi yang dihidupkan kembali. Ini menunjukkan komitmen kita bersama untuk meningkatkan produksi.* (keterangan Dari Bapak Yuhronur Efendi, 22 November 2022).

Dari penjelasan dijelaskan bahwa upaya Kabupaten Lamongan Dalam peningkatan produksi hasil pertanian maka hal yang utama adalah memperbaiki segala fasilitas yang menunjang kegiatan tersebut. Salah satunya adalah pembangunan saluran irigasi yang berguna untuk mengairi wilayah persawahan. Dengan adanya pembangunan irigasi

tersebut maka diharapkan dapat menjadikan kegiatan pertanian berjalan dengan baik dan mendapatkan hasil yang berlimpah.

Dalam menjalankan Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3-TGAI) pemerintah menetapkan beberapa indikator yang berfungsi mengklasifikasikan desa yang benar layak menerima bantuan. Dalam menetapkan lokasi desa penerima bantuan program, pemerintah mengadakan monitoring dan evaluasi di lapangan untuk mengetahui betul permasalahan pertanian yang sedang dihadapi desa tersebut.

Desa Jatidrojog termasuk salah satu desa dari beberapa desa di Indonesia yang mengikuti Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3-TGAI) yang dimasukkan ke dalam Kebijakan Padat Karya Tunai Desa (PKTD). Tujuan utama program adalah membangun tembok penahan tanah untuk menampung debit air yang akan dialirkan ke area persawahan. Karena kebanyakan orang di Desa Jatidrojog bekerja sebagai petani, Program P3TGAI harus diprioritaskan karena berdampak besar pada ekonomi masyarakat. ([Jatidrojog.desa.id](http://Jatidrojog.desa.id))

Desa Jatidrojog terletak di Kecamatan Kedungpring, Kabupaten Lamongan, Jawa Timur. Area ini berbatasan dengan Desa Kradenanrejo di sebelah utara, Desa Warungering di sebelah selatan, Desa Kandangrejo di sebelah timur, dan Desa Mojodadi di sebelah barat. Terdapat tiga dusun di Desa Jatidrojog: Dusun Jati, Dusun Janggal, dan Dusun Drojog. Orang-orang di desa Jatidrojog sebagian besar bekerja sebagai petani; beberapa orang lain bekerja sebagai buruh tani, PNS, atau peternak. Beberapa masyarakat juga menjalankan bisnis seperti toko dan jasa keterampilan. Pembangunan Desa Jatidrojog saat ini dilakukan secara kolektif oleh pemerintah desa dan masyarakatnya, dengan memanfaatkan potensi masyarakat lokal dan kekayaan alam Desa. Beberapa program sektor yang masuk ke Desa Jatidrojog dikomunikasikan dengan pemangku kebijakan yakni pemerintah desa dan dimasukkan ke dalam rencana pembangunan desa. ([Lamongankab.go.id](http://Lamongankab.go.id))

Salah satu cara untuk meningkatkan produktifitas dalam rangka memperbaiki kondisi ekonomi masyarakat melalui sektor pertanian, seperti padi, adalah dengan membangun saluran irigasi yang bermanfaat untuk kegiatan pertanian masyarakat melalui Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3-TGAI). Melalui adanya bantuan program ini, pemerintah desa sebagai penggerak Masyarakat dapat meningkatkan potensi mereka karena sektor pertanian memiliki dampak yang sangat

penting dalam menindas populasi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sebagai desa agraris, struktur perekonomian Jatidrojog berpusat pada pertanian. Lokasi geografis desa ini di dataran rendah, yang membuat tanaman padi menjadi jenis tanaman yang unggul. Hal tersebut juga dijelaskan langsung oleh salah satu petani di Desa Jatidrojog Bapak Samsul, beliau menuturkan :

*tiap tahun ya biasanya ditanami padi mas, berpengaruh, selain padi ya mungkin jagung dan sayur-sayuran, terus pada saat di musim kemarau biasanya tembakau, tapi tergantung kondisi air juga, kalau persediaan masih banyak ya kita tanam, tapi kalau sudah tidak ada ya di biarkan kosong”* (wawancara dengan Bapak Samsul di Desa Jatidrojog, 22 Februari 2023).

Dari penjelasan dari narasumber di atas dapat diartikan bahwa potensi pertanian yang ada di wilayah desa Jatidrojog adalah tanaman padi karena dinilai mudah beradaptasi di lingkungan sekitar. Selain menanam padi masyarakat desa Jatidrojog juga menanam berbagai macam sayur sayuran untuk memenuhi berbagai kebutuhan sehari-hari.

Diharapkan bahwa program padat karya tunai desa yang dilaksanakan melalui Program Percepatan Tata Guna Air Irigasi (P3TGAI) akan menghasilkan peningkatan ekonomi masyarakat. Oleh karena itu, untuk membantu masyarakat, pengelolaan Dana Desa harus dioptimalkan. Terutama terkait pembangunan Infrastruktur yang ada di Desa Jatidrojog, Kecamatan Kedungpring, Kabupaten Lamongan, misalnya, dipengaruhi oleh kebijakan Padat Karya Tunai Desa (PKTD). Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3-TGAI) adalah bagian dari inisiatif yang sedang digencarkan. Program ini mencakup pembersihan sampah, perbaikan saluran drainase, dan pengerukan tanah di sekitar sungai yang dapat mengganggu aliran air. Dengan program yang dilaksanakan, masyarakat Desa Jatidrojog mendukung kegiatan ini.

Oleh sebab itu keberadaan air sangat dibutuhkan oleh petani Desa Jatidrojog di dalam kegiatan pertanian mereka, maka dari itu sistem pengairan dapat di manajemen dengan baik agar dapat memberikan manfaat untuk para petani, terkait dengan data persebaran jaringan irigasi yang ada di Desa Jatidrojog dikelompokkan dalam lingkup kecamatan, terkait hal tersebut dapat dilihat dari tabel berikut ini :

**Luas Irigasi Seksi Pengairan di kecamatan Kedungpring menurut Jenis Pengairan di Kabupaten Lamongan, 2015**

Pengairan <i>Irrigation</i>	Luas Lahan Sawah/ <i>Areas</i> (Ha)			Jumlah <i>Total</i>
	Teknis <i>Technical</i>	1/2 Teknis <i>Semi Technical</i>	Sederhana <i>Non Technical</i>	
Wd. Bowo	-	670	-	670
Wd. Prijetan	4513	-	-	4513
Wd. Caling	-	509	-	509
Wd. Karangasem	-	639	-	639
<b>Jumlah / Total</b>	<b>4513</b>	<b>1818</b>	-	<b>6331</b>
Tahun / Year 2008	4513	1818	-	6331
Tahun / Year 2007	4513	1818	-	6331

Sumber : Dinas Pengairan kecamatan Kedungpring Kabupaten Lamongan Tahun 2015

Berdasarkan data persebaran jaringan irigasi dari Dinas PU Pengairan Kabupaten Lamongan dari tahun 2015 jumlah luas total irigasi yang ada di kecamatan kedungpring berjumlah 6331 (ha). Dengan luas tersebut tentunya menunjang proses kegiatan pertanian yang ada di pedesaan khususnya di Desa Jatidrojog. Proses pengairan yang stabil akan menjadikan kegiatan pertanian di

Desa Jatidrojog menjadi lancar sehingga perekonomian masyarakat menjadi stabil keberadaan beberapa waduk sangat penting karena dapat menampung debit air sehingga dapat dialirkan ke area persawahan masyarakat. Demi menjaga keberadaan sumber air maka perlu diperlukan saluran irigasi yang baik, oleh sebab itu kegiatan P3TGAI perlu diperlukan.

Selama kegiatan P3TGAI untuk wilayah desa sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Desa, mulai dari tahap perencanaan, pengawasan sampai dengan evaluasi. Terkait hal tersebut dapat dijelaskan oleh Bapak Paojan selaku staf Perencanaan Pembangunan Desa Jatidrojog :

*terkait dengan Program P3TGAI ini melibatkan masyarakat sekitar warga desa Jatidrojog, terkait jumlah warganya sendiri yang terlibat saat ini totalnya sekitar 45 an, warga yang mengikuti program ini diutamakan warga yang kesehariannya bekerja sebagai petani. Dan mereka rata-rata*



sudah menjadi anggota kelompok tani. Saat ini program tersebut dirasa sangat berdampak baik terhadap keberlangsungan hidup masyarakat. (Wawancara dengan Bapak Edy Hartono, 23 November 2022)



**Gambar 1.1 1.1 Kegiatan Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi(P3TGAI) di Desa Jatidrojog**

Sumber : Infografis Desa Jatidrojog

Lahan pertanian di Desa Jatidrojog, Kecamatan Kedungpring, Kabupaten Lamongan area persawahannya memanfaatkan jaringan irigasi dimana airnya berasal dari Waduk Gondang yang letaknya sekitar 10 Kilo meter dari lokasi Desa Jatidrojog. Kegiatan pengelolaan jaringan irigasi yang efektif dan efisien, seperti pengerukan di sekitar sungai, akan memengaruhi bagaimana air diberikan ke petak sawah warga. Pada musim kemarau, saluran irigasi sangat penting karena dapat menampung air untuk memenuhi kebutuhan petani. Dalam perumusan kebijakan Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3-TGAI) terdapat beberapa tahapan dan proses. Tahapan berikut adalah persiapan untuk penggunaan Dana Desa untuk Program P3-TGAI dalam lingkup kebijakan Padat Karya Tunai Desa. Tahapan ini diperlukan untuk memantau setiap proses agar program tersebut dapat berjalan dengan baik.

1. Sosialisasi pemanfaatan Dana Desa untuk Program Padat Karya Tunai di Tingkat Kabupaten/Kota:
  - Bimbingan dan sosialisasi teknis ini menjelaskan kebijakan pemanfaatan Dana Desa untuk padat karya tunai dan tahapan untuk mempercepat pelaksanaannya, yang membutuhkan partisipasi semua elemen masyarakat dengan memanfaatkan dana desa.
  - Dinas PMD Kabupaten/Kota melakukan sosialisasi dan pendampingan dengan meminta OPD kabupaten/kota
    - Hasil yang diharapkan dari kegiatan

sosialisasi dan pendampingan ini adalah seluruh peserta sosialisasi akan menerima upah secara tunai sesuai dengan kebijakan penggunaan Dana Desa Tahun 2021.

2. Pembentukan Tim Fasilitasi Penggunaan Dana Desa untuk Padat Karya Tunai: Tim Teknis Fasilitasi Penggunaan Dana Desa untuk Padat Karya Tunai dibentuk oleh Dinas PMD Kabupaten/Kota. Tim ini terdiri dari tenaga pendamping Desa dari aparat OPD dan tenaga pendamping lokal Desa di Kecamatan. Sosialisasi Tingkat Desa
3. Pemerintah Desa dan Tim Fasilitasi kabupaten/kota melaksanakan sosialisasi kebijakan penggunaan dan pemanfaatan Dana Desa Tahun 2021 untuk Program Padat Karya Tunai di tingkat Desa. Hasilnya adalah Desa segera melakukan musyawarah desa untuk melakukan penyusunan atau mengubah RKPDesa dan APBDDesa Tahun 2018 sesuai dengan kebijakan Program Padat Karya Tunai Desa.

Pemerintah Desa Jatidrojog masih melakukan pembangunan infrastruktur dan suprastruktur untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Untuk menentukan jalan ke depan, peran masyarakat jelas sangat penting. Tujuan program P3TGAI adalah untuk meningkatkan layanan irigasi di wilayah persawahan, desa, dan tersier, sehingga dapat mendukung kedaulatan pangan nasional. Oleh karena itu, program ini harus dilaksanakan. Program P3TGAI masih menghadapi beberapa hambatan, salah satunya adalah pembangunan irigasi yang belum menyelesaikan masalah yang dihadapi masyarakat Desa Jatidrojog. Bencana banjir adalah masalah utama yang sering dihadapi di antaranya. Peneliti telah melakukan observasi untuk mengamati kondisi lapangan dalam hal ini. Ini dibuktikan dengan mewawancarai bapak Suratin, seorang petani di Desa Tlanak, kecamatan Kedungpring, yang mengatakan:  
*"Kalau banjir yo ndak pernah mas soale di sini kondisi tanahnya aman, sistem pengairannya yo lancar paling permasalahannya ya Cuma hama tikus. Selain itu nggak ada."* (wawancara bersama bapak Suratin di Desa Tlanak, 23 Februari 2023)

Dari perbandingan tersebut tentunya terdapat permasalahan yang harus diteliti terkait program

P3TGAI di Desa Jatidrojog karena dinilai belum maksimal dalam penyelenggaraannya. sehingga peneliti tertarik untuk melakukan penelitian terkait :

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROGRAM PERCEPATAN PENINGKATAN TATA GUNA AIR IRIGASI (P3TGAI) DALAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DI DESA JATIDROJOG, KECAMATAN KEDUNGPRING, KABUPATEN LAMONGAN.**

## METODE

Penelitian kualitatif merupakan jenis penelitian yang bertujuan untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang dimiliki oleh sejumlah individu atau golongan yang berasal dari masalah sosial atau kemanusiaan (Creswell, 2009:4). Creswell (2009) juga menjelaskan bahwa penelitian kualitatif terdapat berbagai langkah penting, seperti mengajukan pertanyaan dan prosedur penelitian, mengumpulkan data khusus dari peserta, dan kemudian memberikan analisis data secara detail mulai dari titik terendah hingga titik tertinggi. Lokasi Penelitian ini berada di Desa Jatidrojog. Desa ini berada di Kecamatan Kedungpring, Kabupaten Lamongan. Peneliti memilih lokasi ini karena ada banyak masalah yang terkait dengan program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3TGAI) dan masalah yang muncul selama program tersebut.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian dilakukan di Desa Jatidrojog di Kecamatan Kedungpring Kabupaten Lamongan. Desa Jatidrojog terletak pada garis lintang selatan  $6^{\circ} 51'54''$  hingga  $7^{\circ}23'6''$  dan garis bujur timur  $112^{\circ}4'4''$  hingga  $112^{\circ} 33'12''$ . Luas wilayahnya kira-kira 188,47 ha, dan dibagi menjadi wilayah utamanya menjadi sawah tambak 153,95 ha, pemukiman 30.55 ha, dan lahan luar 4.97 ha. Berikut ini peneliti tampilan gedung Kantor Desa Jatidrojog Pada sub bab ini kurang lebih akan menjelaskan terkait dengan kebijakan Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3TGAI) dalam Pembangunan Infrastruktur di Desa Jatidrojog Kecamatan Kedungpring Kabupaten Lamongan .

**Gambar 2.1 Kantor Desa jatidrojog**



Sumber : Dokemtasi Peneliti

Wilayah administrasi Desa Jatidrojog Kecamatan Kedungpring dibatasi oleh: Desa Kradenanrejo dan Desa Gunungrejo di sebelah utara, Desa Kalen dan Desa Warungering di sebelah selatan, Desa Mojodadi di sebelah barat, dan Desa Tlanak dan Desa Kandangrejo di sebelah timur.

Desa Jatidrojog terdiri dari tiga dusun dengan tiga kepala dusun, tiga rukun warga, dan dua belas rukun tetangga. Topografi Desa Jatidrojog di Kecamatan Kedungpring adalah datar dan agak rendah dibandingkan dengan desa lain.

### 1. Kebijakan yang Ideal

Pemerintah Desa menyusun kebijakan sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten /Kota. Berkaitan dengan hal tersebut pemerintah desa perlu mengadakan Musrenbangdes dengan melibatkan seluruh elemen masyarakat desa, di dalam proses Musrenbangdes peran pemerintah desa yaitu mendengarkan semua usulan dari masyarakat desa. Pemerintah Desa didampingi oleh Pemerintah daerah Kabupaten/Kotayang secara teknis dilaksanakan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota. Terkait dengan kebijakan Program Percepatan Pembangunan Tata Guna air Irigasi (P3TGAI) Kepala Desa didampingi oleh tenaga pendamping profesional (TPP), kader pemberdayaan masyarakat desa. Dalam proses tersebut kepala desa melakukan koordinasi agar nantinya pembangunan dapat dilaksanakan secara maksimal. Dalam pembangunan Program Percepatan Pembangunan Tata Guna air Irigasi (P3TGAI) memiliki pengaruh penting karena berkaitan dengan kegiatan perekonomian masyarakat. Dimana hal tersebut mencakup kegiatan pembangunan infrastruktur desa dan pemberdayaan masyarakat desa. Terkait rencana dari program pembangunan tersebut merupakan prioritas utama karena proses pembangunan irigasi sangat mempengaruhi kegiatan masyarakat di bidang pertanian. Oleh sebab itu dalam proses pelaksanaannya perlu adanya suatu kebijakan yang tepat

Berdasarkan hasil penelitian pada Indikator Kebijakan yang ideal disimpulkan bahwasanya dalam proses penyusunan suatu kebijakan yang dapat dikatakan ideal, maka dalam proses perumusan kebijakan pemerintah desa selalu melibatkan semua elemen masyarakat, pada saat proses perumusan kebijakan masyarakat diperbolehkan untuk memberikan masukan serta saran kepada pemerintah desa. Selain itu kegiatan musyawarah ini juga membahas terkait dengan transparansi anggaran yang dilakukan agar masyarakat mengetahui secara langsung terkait dengan pengeluaran

yang dilakukan selama program berlangsung, terkait dengan kelompok sasaran program tersebut dirasa cocok dengan kondisi masyarakat desa Jatidrojog karena rata-rata mereka bermatapencaharian sebagai petani dan masyarakat berharap di dalam program ini ada setiap tahunnya agar dapat membantu proses pengairan.

## 2, Kelompok sasaran

Kelompok sasaran, menurut Wahab(2008:50), adalah "individu, masyarakat, atau organisasi yang akan dipengaruhi oleh suatu kegiatan atau program yang bertujuan memberi dampak" Kelompok sasaran tidak selalu merupakan penerima manfaat.

Mereka yang akan menjadi penerima manfaat hasil dari implementasi program adalah kelompok sasaran. Oleh karena itu, implementasi program idealnya dapat membangun partisipasi aktif dari kelompok sasaran dan mencukupi kebutuhan mereka. Dengan kata lain, implementasi program dikatakan berhasil apabila kelompok sasaran menerima dan berpartisipasi aktif di dalam pelaksanaannya, dan ada kesesuaian antara hasil (output) program dan kebutuhan kelompok sasaran. Korten menyatakan hal ini (dalam Wahab, 2008:52).

Dari keseluruhan pada indikator kelompok sasaran maka disimpulkan bahwa masyarakat yang dilibatkan dalam program P3TGAI ini adalah masyarakat yang ekonominya menengah ke bawah, terkait hal ini Pemerintah Desa Jatidrojog lebih mengutamakan buruh tani daripada petani. Masyarakat yang terlibat dalam program P3TGAI sangat antusias dengan program tersebut karena mendapatkan upah dari apa yang mereka kerjakan yang nantinya akan digunakan untuk kehidupan sehari-hari. Pemerintah Desa Jatidrojog berpendapat bahwa program P3TGAI sudah tepat sasaran karena melihat kondisi demografis Desa Jatidrojog.

## 3, Organisasi Pelaksana

Kinerja pelaksanaan kebijakan oleh organisasi pelaksana, yang terdiri dari organisasi formal maupun informal, dipengaruhi oleh karakteristik dan kesesuaian organisasi pelaksana. Ini terkait dengan konteks kebijakan yang akan diimplementasikan. Untuk melaksanakan kebijakan, beberapa kebijakan harus dipatuhi dengan ketat. Dalam situasi lain, agen pelaksana yang demokratis dan persuasif diperlukan. Cangkupan atau kedalaman kebijakan juga memengaruhi penentuan agen pelaksana kebijakan. .

Di dalam setiap program selalu melibatkan organisasi pelaksana, karena bertugas untuk mengatur jalannya suatu program agar dapat berjalan dengan baik. Di dalam

program P3TGAI desa Jatidrojog membentuk tim yang bertugas untuk memantau jalannya program di lapangan

Dari penjelasan indikator organisasi pelaksana dapat dijelaskan bahwa program P3TGAI yang diselenggarakan di desa Jatidrojog sudah dibentuk tim yang sebelumnya sudah dirembuk di forum musrenbangdes, tim tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab kepala desa selaku pemangku kebijakan yang ada di desa, selain itu personel di dalam tim tersebut juga diambilkan dari masyarakat desa yang berkecimpung di dunia pertanian, kemudian terkait dengan adanya program tersebut pemerintah desa senang sekaligus menjadi tantangan agar bisa menyukseskan program itu nantinya. Karena sebagaimana program tersebut sangat berpengaruh dengan kegiatan masyarakat khususnya di bidang pertanian. Terkait dengan permasalahan masyarakat menganggap bahwa program tersebut kurang mencakup wilayah yang ada di Desa Jatidrojog karena masih ada sebagian area sungai yang belum tersentuh pembangunan. Selain itu permasalahan juga terjadi pada kesadaran masyarakat yang masih rendah terkait dengan kebersihan sungai serta banyak masyarakat desa lain yang membuang sampah di area tersebut akibatnya pada saat musim penghujan bendungan tidak bisa menahan debit air sehingga air tumpah ke area persawahan dan mengakibatkan banjir.

## 4, Faktor Lingkungan

Faktor Lingkungan merupakan suatu hal yang penting dan tidak bisa diabaikan oleh setiap pelaksana kebijakan, di dalam pelaksanaan program P3TGAI di desa Jatidrojog pemerintah desa selaku pemangku kebijakan memperhatikan betul kondisi lingkungan eksternal maupun internal di dalam penyelenggaraannya, selain itu faktor nilai, dan budaya masyarakat menjadi alasan dasar ketika suatu lingkungan kebijakan mempengaruhi suatu keputusan. Keputusan yang sudah dibuat harus diperhatikan lingkungan eksternal dan internal sehingga kebijakan ini mampu diterima oleh masyarakat banyak.

Di dalam program P3TGAI pemerintah desa Jatidrojog berusaha membangun suatu lingkungan organisasi yang nyaman agar pada saat pelaksanaan dapat mencapai tujuan yang diharapkan selain itu juga dapat meningkatkan produktifitas kerja di dalam suatu organisasi, namun tidak hanya lingkungan organisasi secara internal, secara eksternalpun wajib tentunya diperhatikan karena dapat menciptakan sinergi yang luar biasa apabila hal tersebut dapat dikombinasikan sehingga dapat berjalan dengan baik.



Berdasarkan Indikator Faktor Lingkungan P3TGAI pemerintah desa Jatidrojog membangun Lingkungan internal yang nyaman agar dapat mencapai tujuan yang ditetapkan. Di dalam pelaksanaan P3TGAI pemerintah desa Jatidrojog juga memperhatikan lingkungan eksternal yakni terlebih hubungan terhadap masyarakat, hal tersebut penting dilakukan karena akan saling memberi timbal balik akan keberlangsungan program. Terkait dengan kompetensi masyarakat desa paham betul akan tugas masing-masing karena sudah menjadi pekerjaan mereka selama bertahun-tahun. Akan tetapi terdapat suatu permasalahan yakni masih ditemukan sampah yang menumpuk di area bantaran sungai hal tersebut yang masih dikeluhkan masyarakat Desa Jatidrojog sampai saat ini.

## KESIMPULAN

Implementasi Kebijakan Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3TGAI) di Desa Jatidrojog Kecamatan Kedungpring Kabupaten Lamongan sangat penting dilakukan mengingat kondisi masyarakat Desa Jatidrojog yang rata-rata berkerja sebagai petani. terkait program P3TGAI dilakukan setiap tahun akan mengingat pentingnya kebersihan irigasi yang ada di wilayah pertanian, setiap waktu pelaksanaan pihak pemerintah Desa selalu mengajak masyarakat dalam Musrenbangdes dimana forum tersebut merupakan sarana untuk menampung aspirasi masyarakat, di dalam pelaksanaan program P3TGAI Desa Jatidrojog saat ini sebenarnya sudah mendapat dukungan dari petani, hal tersebut dibuktikan dengan antusiasme masyarakat terhadap pelaksanaan,

Pada saat pelaksanaan Program P3TGAI pemerintah desa jatidrojog membentuk TPM tim pemandu masyarakat terkait dengan monitoring dan evaluasi program, dimana tim tersebut terdiri atas perangkat desa dan masyarakat desa yang sebelumnya sudah dipilih. Selain itu dalam proses pelaksanaan dilakukan oleh pihak Kecamatan dan Dinas Bina Marga, masyarakat desa Jati Drojog Berharap akan pemantauan yang dilakukan pihak Kecamatan serta Dinas Bina Marga terkait dengan pelaksanaan Program P3TGAI agar pihak dinas terkait dapat mengetahui betul permasalahan yang dialami masyarakat desa, selain itu kegiatan semacam pemantauan sangat penting karena dirasa dapat membantu menampung aspirasi masyarakat agar nantinya dapat menciptakan sinergi yang luar biasa dalam proses pelaksanaan. Jika komunikasi antar petinggi dan masyarakat baik maka dapat

dijelaskan bahwa di dalam pelaksanaan Program dipastikan program tersebut akan berjalan dengan baik. terkait dengan pelaksanaan program P3TGAI yang sedang dilaksanakan di Desa Jatidrojog Masyarakat Desa sangat mendukung karena melihat kondisi demografis program tersebut dirasa cocok apabila di terapkan.

namun masih terdapat kendala yakni masih banyak menumpuk yang diakibatkan oleh rendahnya kesadaran masyarakat terkait dengan menjaga lingkungan sekitar, selain itu masih banyak truk dari luar yang membuang sampah ke area persawahan warga, dari kejadian tersebut menimbulkan efek yang sangat besar dan jangka panjang yakni pada saat musim penghujan tiba debit air naik sehingga masuk ke area persawahan dan rumah rumah warga, selain itu masih ada permasalahan lain yakni kurang meratanya pembangunan P3TGAI yang ada di area persawahan warga, untuk saat ini pembangunan dirasa masih setengah dan kurang mencakup area persawahan warga. oleh karena itu masih banyak warga yang mengeluhkan keadaan tersebut dan mereka berharap Pemerintah Desa agar segera menyelesaikan pembangunan agar proses pengairan dapat berjalan dengan baik.

Harapan masyarakat Desa Jatidrojog terkait dengan pelaksanaan program P3TGAI diadakan setiap tahun karena merasa sangat terbantu dengan adanya program. Karena jika perairan mereka lancar maka kegiatan pertanian mereka juga nantinya akan berjalan lancar sehingga ketahanan pangan meningkat, hal tersebut tentunya disikapi dengan baik oleh Pemerintah Desa Jatidrojog selaku pemangku kebijakan, tentunya hal tersebut menjadi suatu tantangan bagi Pemerintah Desa Jatidrojog apakah sudah dapat menjalankan sesuai dengan pedoman yang sudah ditetapkan. Oleh karena itu pemerintah desa dan masyarakat dapat bahu membahu dan saling bersinergi agar program tersebut bisa dikatakan berhasil.

## SARAN

Berdasarkan hasil penelitian yang dilaksanakan oleh peneliti melalui metode wawancara, observasi, dan juga Dokumentasi terkait dengan Implementasi Kebijakan Program Percepatan Tata Guna Air Irigasi (P3TGAI) di Desa Jatidrojog beberapa saran yang dikemukakan untuk menyikapi kendala dalam pelaksanaan program antara lain

**a. Bagi Pemerintah Desa**

1. Pemerintah Desa segera melanjutkan proses pembangunan di area persawahan yang dirasa belum memadai, sehingga dalam pelaksanaan program pembangunan merata dan dapat digunakan oleh masyarakat.
2. Membangun tempat pembuangan akhir agar nantinya masyarakat desa tidak membuang sampah di area persawahan.
3. Melakukan sosialisasi terhadap masyarakat desa terkait akan kebersihan lingkungan serta memberikan sanksi yang tegas kepada masyarakat yang dengan sengaja membuang sampah di area persawahan.
4. Pemerintah Desa Jatidrojog memberikan pemahaman kepada masyarakat akan pentingnya pemeliharaan irigasi
5. Kepada pihak pemerintah desa Jatidrojog selaku pemangku kebijakan sebaiknya melakukan monitoring secara berkala mengingat program P3TGAI adalah berkesinambungan yang artinya sarana dan prasarana irigasi harus terjamin tanpa mengandalkan anggaran dari pemerintah pusat maupun daerah.

**b. Bagi Universitas Negeri Surabaya**

1. Sebagai sarana untuk membangun kerjasama dengan pemerintah desa dalam rangka penerapan suatu kebijakan sebagai bahan masukan agar nantinya berhasil jika kebijakan tersebut diterapkan.
2. Sebagai bahan referensi sekaligus menambah koleksi perbendaharaan terkait dengan skripsi yang berhubungan dengan implementasi kebijakan P3TGAI

**c. Bagi peneliti selanjutnya**

1. Bagi peneliti selanjutnya yang akan melakukan kajian yang sama terkait dengan program P3TGAI lebih banyak memperbanyak studi literatur yang berkaitan dengan fokus kajian yang diteliti.
2. Bagi peneliti selanjutnya, disarankan agar meningkatkan lagi ketelitian baik dari segi kelengkapan data yang diperoleh dari lapangan
3. Bagi peneliti selanjutnya disarankan untuk lebih mengembangkan penelitian dengan melakukan observasi secara menyeluruh agar dapat mencakup dan

mengetahui permasalahan yang terjadi di lapangan.

4. Bagi peneliti selanjutnya terkait dengan penelitian sejenis, disarankan untuk mengkaji aspek teknis terkait dengan pengelolaan irigasi.

**UCAPAN TERIMA KASIH**

Peneliti menyampaikan penghargaan dan terima kasih kepada semua pihak yang membantu dalam menyelesaikan artikel ini

1. Allah SWT yang telah memberikan segala kemudahan dalam proses penyelesaian skripsi ini
2. Bapak, Ibuk, Adik serta Keluarga yang selalu memberikan dukungan sehingga peneliti berhasil menyelesaikan artikel ini
3. Bapak Badrudin Kurniawan, S.AP., M.AP. selaku dosen pembimbing
4. Ibu Dr Tjitjik Rahaju, M. Si dan Ibu Indah Prabawati, S.Sos., M.Si. selaku dosen penguji
5. Rekan Saya Qays, dan Dika yang selalu kebersamai dan mendukung peneliti dalam menyelesaikan artikel ini.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Adiwidjaja, Ignatius 2019. "Desa Torongrejo Kota Batu." 8(2): 88-92.
- Abidin 2012, "Kebijakan Publik" STIK-PTIK
- Agustin, Rahaju, 2022. "Evaluasi program TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) Dalam Pembangunan Di Desa Tlogosari, Kecamatan Sumbermalang, Kabupaten Situbondo
- Abdurokhman 2018 "Analisis Implementasi Kebijakan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) sebagai Pendorong Pembangunan Ekonomi di Desa Ngadirejo Slawe, Kecamatan Widang Kabupaten Tuban" *Jurnal of Public Sector Innovation*
- Akmal Muhammad 2020. "Pemberdayaan Masyarakat Petani Melalui Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3-TGAI) (Studi di Desa Tampung Awung Kecamatan Tatah Makmur Kabupaten Banjar Kalimantan Selatan) Universitas Muhammadiyah Malang

- Andi Ratu ,2020. "Implementasi Rencana Kerja Pemerintah Desa Dalam Pembangunan Di Desa Bonerate Kecamatan Pasimarannu Kabupaten Kepulauan Selayar" Universitas Muhammadiyah Makassar.
- Anderson 2015, Kebijakan Publik. Universitas Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
- Agustin 2006 " Implementasi Kebijakan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kantor Badan Pertahanan Nasional (BPN Kabupaten Mojokerto" Universitas Islam Malang
- Bangun, Elpitarina. 2014. "Analisis Perkembangan Desa Mburidi Kecamatan Kutabuluh Kabupaten Karo." 2(1):90-98.
- Creswell 2009. " Metode Penelitian Kualitatif Rekonstruksi Pemikiran Dasar Serta Contoh Penerapan Pada Ilmu Pendidikan Sosial dan Humaniora" CV Literasi Nusantara Abadi
- Dayana dkk 2022. " Pengaruh Program Percepatan Tata Guna Air Irigasi Terhadap Kehidupan Ekonomi Perkumpulan Petani air Se'pon Tengan Desa Se'pon (Jurnal Ilmu Administrasi dan Studi kebijakan)" Universitas Sjahyakitri
- Dasna dkk 2003 " Metode Penelitian" Deepublish
- Damay Rusli, Anwar Sanusi, Dandan Haryono, Dian Hartanti 2021," Efektifitas Program Percepatan Tata Guna Air Irigasi (P3TGAI) di UPT Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Peerumahan dan Pemukiman Wilayah Sukaratu Kabupaten Tasikmalaya" Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Tasikmalaya".
- Eston 2012 "Implementasi Kebijakan Transportasi Umum di Kota Makassar" Universitas Bosowa
- Friedrich 2019 "Analisis Kebijakan Publik" Universitas Negeri Makassar
- Grant Walsen, Tri Budi Prayogo, Hari Siswoyo 2022 "Penilaian Kinerja Jaringan Irigasi Air Tanah di Daerah Oncoran SDMj 552 Desa Purwojati Kecamatan Ngoro Kabupaten Mojokerto" Universitas Brawijaya.
- Gordon 2016, " Implementasi Program Kotaku dalam Upaya Mengatasi Pemukiman Kumuh di Kabupaten Lima Puluh Kota" Universitas Negeri Padang
- Habil Marande "Teori dan Model Implementasi Kebijakan Publik" Universitas Brawijaya.
- Heglo 2012, "Kebijakan Pembangunan Rumah Untuk Suku Laut di Kabupaten Lingga (Studi Pada Dusun I Dapur Arang Desa Kelumu)" Jurnal Umrah
- Hikmat 2004 " Pelaksanaan Denda pada Pembiayaan iB Bisnis melalui Akad Muharabah di Bank CIMB Niaga Syari,ah Kantor Cabang Syari'ah Kantor Cabang Syari'ah Bandung" Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati Bandung
- Idris dkk 2020. "Konsep Partisipasi Petani Dalam Pengembangan dan Pengeloaan Jaringan Irigasi" Direktorat Pengairan dan Kementerian PPN/Bappenas.
- Irfan Sofi 2020. "Implementasi Padat Karya Tunai Desa untuk Masyarakat Miskin di Kabupaten Pasuruan dan Kabupaten Probolinggo" Analisis Keuangan Pusat dan Daerah, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan.
- Islamy Irfan "Definisi dan makna kebijakan publik " Universitas Terbuka
- Kuncoro 2010 " Analisis Perumusan Strategi Bisnis pada PT Samudera Nusantara Logisindo" Binus University
- Lalu Hanis dkk 2022 "Pelaksanaan Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3TGAI) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Petani "Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Muhammadiyah Selong.
- Listyaningsih 2014 " Implementasi Penguunaan Dana Desa terhadap Pembangunan (Studi Kasus Desa Sengkubang Kecamatan Mempawah Hilir Provinsi Kalimantan Barat) Universitas Nasional
- Linda Rahayu 2010 "Kajian Kinerja Sistem Jaringan dan Pembiayaan Irigasi di Daerah Irigasi Sampean Baru " Universitas Jember.
- Loly Martina Martief 2022. "Pengembangan Indikator Penilaian keberhasilan Program Percepatan Peningkatan Tata

- Guna Air Irigasi (P3TGAI), Kementerian Perumahan Umum dan Perumahan Rakyat
- Mawaddah 2021. Penguatan Kapasitas Masyarakat Sebagai Subjek Pembangunan Melalui Program Padat Karya Tunai di Desa Lembang Lohe Kecamatan Tellulimpoe Kabupaten Sinjai” UIN Alauddin Makassar.
- Muchlis 2014, “Implementasi Kebijakan Sistem Perizinan Online Single Submission (OSS) Dalam Pelayanan Publik di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Muaro Jambi” *Journal Of Government Studies*.
- Muhammad Dwi Prakasa 2022 “Implementasi Kebijakan Penyelenggaraan Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3TGAI) di BBWS Brantas di Kabupaten Malang ” Universitas Muhammadiyah Malang.
- Merita Ayu Indrianti, Karmilla Olli 2018. “Dampak Program Percepatan Tata Guna Air Irigasi (P3TGAI) Secara Partisipatif Terhadap Ketahanan Pangan Nasional di Kabupaten Bone Bolango”. Universitas Muhammadiyah Gorontalo
- Modifa Ira, Pasaribu 2019 “ Kajian Kegiatan P3TGAI Dalam Manajemen Proyek di Kabupaten Tapanuli Tengah” Universitas Simalungun.
- Mukhadis 2003 “ Kesiapan Guru SMK Program Keahlian Teknik Komputer dan Informatika dalam Pelaksanaan Kurikulum 2013” *Jurnal Universitas Muhammadiyah Malang*
- Moelong, 2010 “Bentuk Penguatan Pendidikan Karakter Pada Peserta Didik dengan Penerapan Reward dan Punishment” Universitas Negeri Padang
- Nasution, Kurniawan, 2023. Implementasi Kebijakan Kerjasama Antar Desa di Badan Usaha Milik Desa Bersama ( Studi Kasus Bumdesma Kampung Batik di Desa Klampar Kec Propo Kab. Pamekasan).
- Nawawi 2009, “ Analisis Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Penanganan Covid 19 :perspektif Hukum Administrasi Negara” Universitas Surabaya
- Nain Umar, Faisal 2019 “ pembangunan Desa dalam Perspektif Sosiohistoris” *Garis Khatulistiwa Makassar*.
- Nippi, Andi Tenri, and Andi Pananrangi M. 2019. “Strategi Pemerintah Desa Dalam Pemberdayaan Kelompok Tani (Studi Kasus Di Desa Siawung Kecamatan Barru Kabupaten Barru).” *Meraja Journa 2*(1): 35–47.
- Noch Turangan “ Pengembangan Tata Kelola Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3TGAI) di Provinsi Sulawesi Utara ” Universitas Sam Ratulangi.
- Parsons 2006 “ Pengantar Teori dan Praktik Analisis Kebijakan” Kencana Prenada Media Group
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2006 Tentang Irigasi
- Prasojo 2015. “ Peran Pemerintah-Masyarakat dalam Pembangunan Desa Sedatigede Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo” Universitas Muhammadiyah Sidoarjo.
- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No 4 Tahun 2021 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi
- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No 24 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi
- Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Desa Tahun 2018 Untuk Padat Karya Tunai
- Pedoman Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi Tahun 2017
- Pedoman Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi Tahun 2021
- Prabawati. 2018 “Studi Implementasi” Universitas Negeri Surabaya.
- Rahayu 2010 “ Kajian Kinerja Sistem Jaringan Irigasi dan Pembiayaan Irigasi di Daerah Irigasi Sampean Baru” Universitas Jember.
- Risky Akbar Prasojo 2015. “Peran Pemerintah-Masyarakat Dalam Pembangunan Desa” Universitas Muhammadiyah Sidoarjo.
- Rinawati (2020). “Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Pelaksanaan Pembangunan

- Pemberdayaan Masyarakat Desa Kuala Penaso Kecamatan Pinggur Kabupaten Bengkalis” Universitas Islam Riau..
- Rendra Dachroni dkk 2018 “Implementasi Kebijakan Pembangunan Desa Pesisir Kabupaten Bintan Provinsi Kepulauan Riau” Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Raja Haji Tanjung Pinang.
- Resmawan Erwin 2015, “Implementasi Kebijakan Pembangunan Infrastruktur Transportasi Bandar Udara dan Jalan di Kabupaten Malinau” Universitas Hasannudin.
- Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDES) Jatidirojog Tahun 2021-2022 .
- Roni Ritongga Manembu “Padat Karya Sebagai Kontribusi Kehidupan Masyarakat Pada Penggunaan Dana Desa ( Studi Kasus Desa Kaneyan Kecamatan Tareran Kabupaten Minahasa Selatan )” Universitas Sam Ratulangi.
- Renstra Menteri PUPR Tahun 2020-2024
- Rusli dkk 2021, Program Percepatan Tata Guna Air Irigasi (P3TGAI) di UPT Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang , Perumahan dan Permukiman Wilayah Sukaratu Kabupaten Tasikmalaya” Jurnal Indonesia Sosial Teknologi
- Sugiman, Sugiman. 2018. “Pemerintahan Desa.” *Binamulia Hukum* 7(1): 82–95.
- Sucipto 2011 “Evaluasi Pemeliharaan Jaringan Irigasi Sungkur Kabupaten Ponorogo Provinsi Jawa Timur” Universitas Sebelas Maret Surakarta.
- Syaukani 2004,” Implemetasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Kota Manado ( Studi di Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Manado) Jurnal Universitas Sam Ratulangi
- Sulistiyastuti 2012” Implementasi Kebijakan Publik : Konsep dan Aplikasinya di Indonesia” Gave Media
- Sari Bella Saputri 2020 . “Strategi Kebijakan Dalam Pembangunan Infrastruktur Desa(Studi Kasus dalam Pembagunan Infrastruktur di Desa Sidomulyo, Kecamatan Krian Kabuaten Sidoarjo” Universitas Sunan Ampel Surabaya.
- Smith, Islamy 2001 “ Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 2 Tahun 2009 Dalam Perspektif Sustainable Development ( Studi Pada Himpunan Petani Pemakai Air ) Tirto Banjar Agung Desa Padangan Kabupaten Bojonegoro.
- Siagian 2000 “ Adminitrasi Pembangunan : Konsep, Dimensi, dan Strateginya” Universitas Gadjah Mada
- Spengler 2014 “ Pembangunan Desa Berbasis Sumber Daya Manusia dan Kewirausahaan” Universitas Islam Batik Nusantara
- Sugiyono 2019 “ Pengaruh Tata Ruang Perpustakaan Terhadap Minat Kunjung Mahasiswa di Perpustakaan Politeknik Kesehatan Kemenkes Ternate” Universitas Sam Ratulangi
- Sultan Isnaeni, 2021 “Analisis Sosial Ekonomi Petani Padi Sebelum dan Pengembangan Irigasi (Studi Desa Bakti, Kecamatan Ponrang Selatan, Kabupaten Luwu)” Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo
- Saldana, Huberman, Miles 2014 “ Implemantasi Program Kembang Giri pada Wisata Edukasi dan Tematik Kawasan Pesisir Tamban Kota Pasuruan” Universitas Negeri Jember
- Tahir 2023 “Kebijakan Publik dan Good Governancy” Universitas Negeri Gorontalo
- Tachjan , M. Si. Implementasi kebijakan Publik
- Thomas 2012 “ Konsep Dasar Kebijakan Publik” Badan Penerbit Universitas Diponegoro
- Utami Dewi “Pendekatan Top Down versus Bottom Up” Universitas Negeri Yogyakarta
- Undang-undang Republik Indonesia No 7 Tahun 2004 Tentang Sumber Daya Air
- Undang-undang Republik Indonesia No 6 Tahun 2016 Tentang Desa
- Yuliana, Desi Rahmawati, Ricih, Rusmiyanti, Yeni Susanti 2022 “Implementasi Kebijakan Program Tata Guna Air Irigasi (P3TGAI) Oleh Balai Besar Wilayah Sungai Sumatera VIII di Kota Palembang ” Universitas Sjahkaki Palembang

- Yusuf 2013 “Integrasi Sosiokultural Siswa Dalam pendidikan Multikultural Melalui pembelajaran Sejarah” Universitas Lampung
- Wilda Sari 2020. “ Peran Kepala Desa Dalam Pembangunan Infrastruktur Jalan di Desa Kariango Kecamatan Lembang Kabupaten Pinrang ” Universitas Muhammadiyah Makassar.
- Wahab 2020 “Analisis Kebijakan : dari Formulasi ke Penyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan Publik” Bumi Aksara



